



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DARMADI UTOMO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**
3. NHK : **649633**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **486.761.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 479 m²/65 m² di KOTA PONTIANAK , HIBAH TANPA AKTA Rp. 216.761.000
2. Tanah Seluas 517 m² di KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/98 m² di KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m² di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m² di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m² di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 20000 m² di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
8. Tanah Seluas 20000 m² di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **240.500.000**

1. MOTOR, VESPA PX 150 E/EKSEKUTIF Tahun 1985, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI KZ-200 / BINTER Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000



3. MOTOR, HONDA GENIO/C1M02N42L0 A/T / SOLO Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5 ULTIMATE-X A/T Tahun 2019,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	486.069.756
F. HARTA LAINNYA	Rp.	36.000.000
Sub Total	Rp.	1.325.130.756
III. HUTANG	Rp.	220.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.105.130.756

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.